



Edisi 1 Mei 2026 :

STUDI KASUS DEMOKRASI DI AMERIKA SERIKAT

Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP

PENDAHULUAN

Penerbit Gramedia mempublikasi sebuah buku berjudul Bagaimana Demokrasi Mati (*How Democracies Die*), karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) tentang sejarah pasang surut demokrasi di negara Amerika Serikat.

Dibawah ini adalah sedikit kutipan Penulis tentang isi buku tersebut.

Pada kata pengantar, Penulis buku tersebut menyatakan bahwa :

- Demokrasi itu rapuh dan dapat ber-metamorfosa.
Makin panjang umur iklim-demokrasi, makin lengah bangsa itu dalam menjaga kualitas/kemurnian demokrasi cq kualitas pemilu.
- Dasar sistem demokrasi AS adalah
 - Konstitusi tentang demokrasi
 - *Credo* tentang kebebasan dan kesetaraan nasional
 - Kelas menengah nan-kuat sepanjang sejarah
 - Tingginya tingkat pendidikan dan kekayaan
 - Sektor swastanan-beragam, kokoh dan besar
- Budaya politik demokrasi adalah memperlakukan partai-lain atau calon-lain bukan sebagai musuh.
- Pemerintah dan rakyat menjaga lembaga pelindung demokrasi, antara lain pengadilan, badan intelijen, pers dan kantor-kantor etika/HAM.
- Menurut dua penulis buku tersebut, sebagian besar demokrasi mati karena fasisme, komunisme dan kekuasaan militer lewat kudeta bersenjata, pemerintahan serta-merta diganti sistem pemerintahan diktator (misalnya Jerman, Hitler), sebagian mati pelahan-lahan (misalnya, Chaves, venezuela, menang pemilu 1998 menjadi presiden, 2003 menjadi diktator, 2006 tampil sebagai presiden terpilih seolah-olah demokratis, 2012 menang lagi pada pemilu bebas tapi tidak adil, lalu meninggal kena kanker, lalu 2017 konstituante kongres partai tunggal, menjadi negara bersistem otoriter) dan sebagian lagi malih-rupa (mimikri demokrasi) dimana rakyat tidak sadar bahwa negaranya telah berubah menjadi negara otoriter (misalnya, Pinochet, Chile) karena

menjadi otokrat hasil pemilu (bebas) mampu mempertahankan tampilan demokrasi yang telah kehilangan substansinya (tidak jujur).

- Menurut penulis buku tersebut, di AS, erosi norma-norma demokratis menurun tahun 1980-an dan 1990-an, menurun makin cepat pada tahun 2000 an ditandai polarisasi kelompok ekstrim era Barack Obama, lalu dipercepat pada 2016 pada era Donald Trump.
- Pada hampiran metamorfosa demokrasi , pembajakan demokrasi dilakukan secara legal terhormat oleh pemerintahan otokrasi dengan cara
 - Keputusan penguasa disetujui lembaga legislatif dan diterima lembaga yudikatif.
 - Pemerintah memperbaiki kualitas demokrasi dengan berbagai program populis seperti efisiensi pengadilan, memerangi korupsi, membersihkan proses pemilu, meningkatkan PDB & kemakmuran bangsa.
 - Media massa “di beli” pemerintah, survei jajak-pendapat publik bukan-rekayasa berkesimpulan bahwa rakyat hidup dalam alam demokrasi , karena tak pernah ada pengumuman hukum-militer apalagi kudeta.
 - Pengkritik pemerintah secara tak-sengaja mendapat masalah pajak dan masalah hukum lain.

DONALD TRUMP DAN EMPAT INDIKATOR PERILAKU OTORITER

Buku tersebut menyinggung potensi Trump melanggar demokrasi. Tabel 2, halaman 49, buku tersebut, dengan judul khas di atas , menguraikan butir-butir sbb :

<p>Penolakan atau komitmen lemah terhadap aturan main non-demokratis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah mereka menolak konstitusi atau menunjukkan kesediaan melanggar konstitusi ? • Apakah mereka mengusulkan berbagai cara berwarna anti-demokrasi seperti membatalkan pemilu, melanggar/membatalkan konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak azasi - sipil dan politik ? • Apakah mereka berusaha atau menyetujui menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan, seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk-rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan ? • Apakah mereka berusaha merusak legitimasi pemilu, misalnya menolak hasil pemilu kredibel ?
<p>Menyangkal legitimasi lawan-politik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar atau menentang tatanan konstitusional yang ada ? • Apakah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial bagi keamanan-nasional dan kehidupan publik ? • Apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan-politik sebagai kriminal, melanggar hukum atau berpotensi melanggar hukum sehingga tak-memenuhi syarat ikutserta dalam arena politik ?

	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah tanpa-dasar mereka menyatakan bahwa lawan-politik diam-diam dipekerjakan pemerintah asing yang biasanya bermusuhan dengan negara kita?
Toleransi atau anjuran kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan para-militer, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan ? • Apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan-massa terhadap lawan-politik ? • Apakah mereka secara tak-langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak mencela atau menghukum kekerasan ? • Apakah mereka pernah memuji atau menokak mencela suatu tindakan kekerasan politik.
Membatasi kebebasan sipil lawan-politik dan media	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah mereka mendukung hukum/kebijakan pemerintah tentang pembatasan kebebasan-sipil, elaborasi/perluasan hukum pencemaran/penistaan nama-baik, hukum pembatasan protes/kritik terhadap pemerintah atau organisasi tertentu ? <p>Apakah mereka pernah mengancam akan melakukan tindakan-hukum terhadap para pengkritik yang berada/pro-partai lawan, masyarakat sipil dan media-massa ?</p> <p>Apakah mereka pernah memuji tindak represif dilakukan pemerintahan negara lain.</p>

Halaman 162 buku tersebut mengungkapkan bahwa nasib demokrasi AS tahun-tahun selanjutnya pemerintahan Trump tergantung pada beberapa faktor.

- Yang pertama adalah perilaku para pemimpin Partai Republik, apakah akan tetap mendukung atau menentang kursi kepresidenan Trump, belajar dari sejarah Partai Demokrat memutuskan balik-arrah , bangkit dan menentang Roosevelt, partai Republik memutuskan berhenti mendukung Nixon. Dengan demikian tugas Presiden memelihara hubungan baik dan kepastian dukungan berlanjut sepanjang pemerintahannya.
Presiden bertugas memelihara kekuatan kelompok loyalis aktif yang secara aktif melindungi Presiden dari segala serangan partai-oposisi dan masyarakat, terutama pada proses meluluskan suatu rancangan UU atau program yang banyak ditentang, dan merangkul loyalis pasif dan loyalis kritis dalam partai.
- Yang kedua adalah pengurangan/penahanan/pembatasan (*containtment*) perilaku penggunaan kekuasaan/wewenang Presiden yang berisiko lewat-batas, dilakukan oleh anggota partai pendukung presiden yang mendukung berbagai program utama kabinet, misalnya penunjukan hakim, reformasi pajak dan tema kesejahteraan sosial , pernyataan publik bahwa anggota partai tersebut menarik dukungan untuk rencana atau kebijakan berbahaya bagi diri atau kelompok kepentingannya, secara tiba tiba menarik dukungan tatkala Presiden menyalahgunakan kekuasaan.
- Yang ketiga adalah risiko pemakzulan presiden , bila dipandang amat dan jalan terbaik dan mungkin pilihan-terakhir penyelamatan diri partai politik tersebut.

Di AS, dukungan publik kepada presiden adalah segalanya. Makin tinggi rating dukungan publik, misalnya mencapai 70 % , sikap oposisi dan pengiritik cenderung melemah, liputan media makin ramah, hakim makin enggan membuat keputusan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, politikus pesaing mengurangi kebiasaan omong-kasar karena berisiko terkucil-sosial/politik.

Sebaliknya, apabila dukungan publik & popularitas presiden menurun atau sedang pada posisi rendah, partai oposisi, media dan para analis politik makin berani mengkritisi kabinet , hakim menentang bahkan menantang Presiden, sekutu Presiden cq Partai sekutu membelot , kekuatan asing melakukan infiltrasi.

Bagi jabatan presiden , rating publik adalah segalanya. Rating, dapat berubah karena

- kondisi politik-ekonomi global dan DN ,
- peristiwa luar-biasa yang mengganggu agenda-kabinet , misalnya peristiwa 9/11 tahun 2001,
- panen gagal karena cuaca/hama,
- bencana alam cq gempa-bumi, covid dan lain-lain,
- rating publik tersebut dikoreksi oleh kualitas kebijakan kabinet dan kualitas pelaksanaan kebijakan , sehingga kebijakan Presiden secara intensif harus diterangkan kepada publik.

Dukungan publik meningkat apabila Presiden mengambil langkah tepat dan tegas saat krisis nasional, sebagai kepala negara , tergantung kualitas penerangan/penjelasan kepada publik , publik dapat memahami bahkan mendukung tindakan otoriter tertentu dalam kondisi krisis asal penggunaan wewenang nir-konstitusional tersebut segera dihentikan paska-krisis.

DEMOKRASI DI AS

Kedua pengarang buku tersebut mengungkapkan bahwa berbagai *pool* di AS, antara lain survei 1999 menyimpulkan bahwa sebagian besar atau 85 % WN AS percaya bahwa konstitusi nan-baik menyebabkan AS mampu mencapai umur 100 tahun pertama.

Memerlukan bingkai-waktu amat-panjang untuk mengubah sikap permusuhan-keras berbasis antipati/kebencian/intoleransi nan-irasional berdarah-darah antar-partai menjadi sekadar persaingan politis berbasis pembentukan citra, program dan dukungan publik , dengan kesadaran baru bahwa kemenangan kandidat partai nya hanya seumur kabinet yang akan datang (misalnya 4 tahunan).

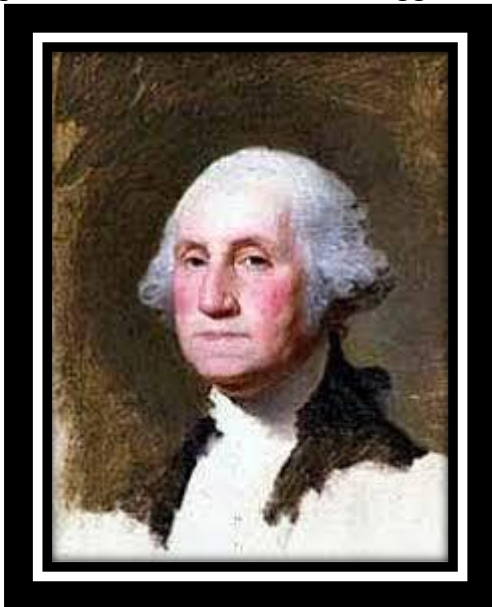
Sistem konstitusional berinti pengawasan dan perimbangan kekuatan trias-politica mampu mencegah pemimpin negara menyalah-gunakan kekuasaan. Setelah perang saudara berakhir, konsentrasi kekuasaan pada Presiden Lincoln segera di cabut Mahkamah Agung. Penyadapan ilegal Presiden Nixon memicu penyidikan DPR , yang berujung preseden Presiden terpaksa mengundurkan diri.

Desain awal Konsitusi AS tak mengatur bahwa seorang Presiden hanya dapat mencabat dua kali Pemilu berturut-turut , namun berbasis konvensi dan perilaku beberapa presiden percontohan. George Washington berhenti pada tahun 1797 setelah memimpin dua-masa jabatan sebagai Presiden nan-kuat mengikuti Thomas Jefferson sebagai Presiden pertama AS , yang menyatakan :”*Bila penghentian masa-bakti (Presiden) tidak ditetapkan Konstitusi, maka masa jabatan yang semestinya empat-tahun, bisa berlangsung seumur-hidup...*

Seharusnya saya enggan menjadi orang yang memberi contoh pertama perpanjangan masa-jabatan sesudah masa-jabatan kedua, mengabaikan preseden-baik yang diberikan seorang pendahulu terkemuka”.

Pernyataan itu kemudian menjadi tonggak sejarah AS , semacam konvensi, sehingga batas informal dua masa-jabatan terbukti kuat. Ketika Ulysses S. Grant di dorong para sahabat Grant untuk maju-lagi pemilu untuk masa jabatan ketiga , terjadilah kehebohan publik, dan DPR AS membuat resolusi yang menyatakan :”*Preseden yang ditetapkan Washington dan para presiden lain... yaitu berhenti ... menjabat sesudah masa jabatan kedua, telah menjadi ... suatu bagian sistem Republik kita... Penyimpangan apapun dari kebiasaan yang dihargai selama ini kiranya tidak bijak, tidak patriotis, dan membahayakan lembaga-lembaga bebas kita”.*

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1892 Partai Demokrat menolak mencalonkan kembali Grover Cleveland untuk masa-jabatan ketiga **yang tidak berturut-turut** , Partai memperingatkan bahwa pencalonan itu melanggar hukum tidak-tertulis AS. Pada tahun 1940, pemilihan kembali FDR melanggar norma tersebut sehingga memicu ratifikasi Amandemen



ke 21 tahun 1951 UUD yang secara hukum membatasi masa jabatan Presiden maksimum dua-kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Tanpa dukungan rakyat dan konstitusi , negara menghadapi krisis-konstitusional, kebuntuan dan disfungsi struktural pemerintahan, Presiden tak-berbatas masa-jabatan berisiko menguasai Mahkamah-Agung dan Lembaga-Legislatif. Lembaga Legislatif berkekuasaan absolut akan mengambil-alih kekuasaan-eksekutif dengan mernolak semua kebijakan presiden dan usulan RAPBN sampai mencopot/mengganti Presiden tanpa-alasan.

Perang saudara di AS merusak tatanan demokrasi, sepertiga negara bagian AS tidak ikut Pemilu tahun

1864, lebih dari seperempat kursi DPR di kosongkan, Presiden Lincoln membebaskan para budak, sebagian besar konfederasi (Selatan, sebagai pihak kalah-perang) berada di bawah kekuasaan militer. Pada tahun 1866, Kongres yang di kuasai Partai Republik mengurangi jumlah hakim di MA dari 10 menjadi 7 untuk mencegah Presiden Andrew Johnson dari Partai Demokrat menunjuk Hakim Agung. Kongres mengesahkan Tenure of Office Act yang melarang Presiden mencopot anggota-anggota kabinet Lincoln tanpa persetujuan senat. Presiden mengabaikan UU tersebut dan di makzulkan tahun 1868.

Generasi Perang Saudara berganti generasi baru, Partai Demokrat dan Partai Republik belajar hidup berdampingan dan menggeser perdebatan politik ke perdebatan ekonomi dan AS memasuki era kerjasama bipartisan/antar partai yang menghasilkan berbagai keputusan reformatif seperti pajak penghasilan federal, pemilihan langsung senator AS, dan hak-suara perempuan. Pertumbuhan sikap toleransi antar partai menyuburkan budaya menahan diri demi kebaikan bangsa/negara, pada abad 19 di tandai pertumbuhan sistem-pengawasan nasional dan perimbangan nan-sehat dalam segala hal , merawat konvensi-konvensi bernegara nan-baik sebagai topsoil demokrasi.

Pada abad 20 segala sistem toleransi dan sikap menahan-diri telah berbentuk kelembagaan-formal menjaga keseimbangan nan-rapuh, menjadi model dikagumi berbagai negara lain. Tugas Senat/DPR dan pengadilan AS adalah mengawasi risiko pelanggaran konstitusi oleh Presiden, menengarai dinamika iklim politik berbasis kebencian dan perilaku kasar, dan memantau/melindungi independensi lembaga lembaga normatif. Terdapat enam kekuasaan yang harus selalu di pantau kesehatannya : 3 kekuasaan presiden adalah perintah eksekutif, amnesti presiden dan penunjukan hakim, 3 kekuasaan DPR adalah *filibuster* (bicara, debat, dan menunda pengesahan RUU), memberi nasihat dan persetujuan, dan pemakzulan Presiden. Penggunaan nan-keliru salah-satu saja dari 6 kekuasaan itu menyebabkan kemajuan-kemunduran bangsa, misalnya kekuasaan amnesti untuk mengampuni diri-sendiri. Kalau DPR dan Pengadilan di subordinasi Presiden, tandanya trias-politika mati, demokrasi mati. Ketika Presiden Trump memecat Jaksa Agung Jeff Session, para senator Republik membela Session. Para Senator membangun garis-batas perilaku Presiden untuk mengekang Presiden dan menentukan “ garis batas”.

Sejarah mencatat Presiden Washington dalam kapasitas menahan diri dan pembangunan kelembagaan pemerintahan nan-tangguh & mulia, seperti di nyatakan sejarawan Gordon Wood sbb : “ *Andai dipilih satu orang yang bertanggung-jawab sebagai pemberi dasar-kuat bagi AS sebagai sebuah Republik muda, Washinton lah orang nya*”.



Terjadi tren peningkatan kemampuan/kekuatan Presiden dalam bidang hukum, administrasi pemerintahan, militer dan intelijen sepanjang abad 20, dan terjadi tren bahwa para Presiden lebih kuat dalam mengikuti norma-norma membatasi-diri selaras konstitusi & konvensi (sebagai hukum tak tertulis) dalam interaksi kepada kongres dan pengadilan, bersikap bijak dalam mengeluarkan perintah-eksekutif apalagi amnesti, agar jangan sampai tertuduh untuk kepentingan pribadi, menjauhi citra partai politik

meng-utak-atik apalagi membawahi MA dan DPR, dan dengan sekuat tenaga selalu memamerkan kepatuhan atas keputusan MA dan DPR. Terjadi tren peningkatan kesadaran para Presiden dalam menjaga melindungi kebebasan pers.

PENUTUP

Artikel amat naif dan dangkal, bukan ringkasan buku *Bagaimana Demokrasi Mati*. Terkait riwayat demokrasi AS, sejarah mencatat bahwa pasca era kolonial Amerika Latin, muncul berbagai negara baru di Amerika Latin, yang menggunakan konstitusi AS sebagai model, bahkan beberapa negara baru melakukan kopi-pasta plus sedikit-modifikasi, yang pada intinya bersistem presidensial, badan legislatif bikameral, mahkamah agung, sebagian bahkan ikutan *electoral college* dan/atau sistem negara federal.

Konstitusi versi kopipasta biasanya mati diterjang budaya-bangsa cq watak bangsa ribuan tahun, misalnya konstitusi 1853 Argentina tak mampu menghalangi pemilu curang abad 19, beberapa kudeta militer abad 20 plus otokrasi Peron. Konstitusi kopipasta 1935 Filipina bahkan mirip salin-sinar / fotocopy konstitusi AS dibuat dibawah pengawasan pemerintah kolonial yang akan mohon-diri dan disahkan oleh DPR AS, lalu diterabas presiden Ferdinand Marcos tahun 1972 dengan kilah darurat-perang.

Berbagai kalimat konstitusi AS membutuhkan elaborasi-tafsir berabad-abad, misalnya penggal kalimat; “nasihat dan persetujuan”, “kejahatan dan perilaku keliru” dan banyak lagi, UU & peraturan pelaksanaan konstitusi yang lain mengandung risiko pelunakan/pelanggaran bahkan pembelokan/pelanggaran makna-hakiki konstitusi.

Hampir semua konstitusi mengandung konsekuensi praktis diluar konstitusi, misalnya seleksi, identifikasi dan sistem pengguguran kandidat kepala-negara bercatatan-sejarah gelap, definisi masa-krisis dan masa-perang, pembentukan sistem pengawasan khusus jaksa-agung, sistem evaluasi dekrit presiden dan perpu, identifikasi hukum tak-tertulis yang lebih dipatuhi ketimbang hukum positif, tatacara pemagzulan presiden dan tatacara perubahan konstitusi itu sendiri.

Ringkasan AI menyimpulkan bahwa kesehatan demokrasi AS sedang menurun, dengan negara tersebut sering dikategorikan sebagai "demokrasi yang cacat" karena polarisasi dan melemahnya institusi. Pada awal tahun 2026, V-Dem Institute menempatkan AS pada peringkat yang jauh lebih rendah, dengan menyebutkan penurunan "yang belum pernah terjadi sebelumnya" pada tahun 2025 menjadi skor 0,57, terendah sejak tahun 1965.

Demikian pula, indeks EIU 2025 menurunkan AS ke peringkat ke-34 secara global.

- V-Dem Institute (Data 2025/2026): Skor AS pada Indeks Demokrasi Liberal turun menjadi 0,57 (pada skala 0-1). Laporan tersebut menunjukkan penurunan yang "belum pernah terjadi sebelumnya", menempatkan AS di peringkat ke-51 dari 179 negara pada tahun 2026, yang didorong oleh tantangan terhadap kebebasan sipil, kebebasan media, dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
- Indeks Demokrasi EIU (Data 2025/2026): Economist Intelligence Unit (EIU) mengkategorikan AS sebagai "demokrasi yang cacat". Indeks tahun 2025 menyoroti kemerosotan lebih lanjut, menaikkan peringkat AS dari ke-28 menjadi ke-34.
- Faktor Utama Penyebab Penurunan: Para analis menunjukkan penurunan fungsi pemerintahan, berkurangnya budaya politik, polarisasi politik, dan ancaman terhadap integritas proses pemilihan sebagai alasan utama penurunan tersebut.
- Perbandingan: Meskipun AS tetap menjadi negara dengan kinerja terbaik dalam banyak metrik global dibandingkan dengan semua negara, AS telah tertinggal dari banyak negara demokrasi Barat lainnya.

Amerika Serikat sering dianggap sebagai negara dengan "demokrasi yang cacat" daripada "demokrasi penuh" dalam metrik tersebut karena, meskipun pemilihan umum sebagian besar bebas, aspek fungsional pemerintahan demokratis berada di bawah tekanan yang signifikan.